

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu di Kabupaten Tebo, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana Pemilu di Kabupaten Tebo, khususnya kasus penggelembungan suara pada Pemilu 2024, menunjukkan masih adanya penyelenggara Pemilu yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara memanipulasi hasil suara. Hal ini mencerminkan lemahnya integritas penyelenggara serta pengawasan dalam proses Pemilu.
2. Faktor utama terjadinya tindak pidana Pemilu di Kabupaten Tebo antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, praktik politik uang, lemahnya integritas sebagian penyelenggara, serta keterbatasan sarana dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.
3. Penegakan hukum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah berjalan sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh waktu penanganan perkara yang singkat, ego sektoral antarinstansi, serta adanya kepentingan politik lokal yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Gakkumdu): perlu meningkatkan koordinasi, profesionalitas, dan independensi dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.
2. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu): harus memperkuat integritas dan kompetensi penyelenggara di tingkat daerah melalui pelatihan, pengawasan ketat, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik maupun pidana.
3. Bagi Masyarakat: perlu diberikan edukasi hukum dan sosialisasi yang berkesinambungan mengenai pentingnya partisipasi yang jujur dan bebas dari praktik politik uang, agar tercipta budaya politik yang demokratis dan bermartabat.
4. Bagi Pembuat Kebijakan: perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi penanganan tindak pidana Pemilu, khususnya terkait tenggat waktu yang terlalu singkat, agar penegakan hukum lebih efektif dan tidak terhambat teknis administrasi.

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan ke depan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu di Kabupaten Tebo dapat lebih efektif, adil, dan memberikan efek jera kepada para pelanggar, serta mampu menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.